

**PENGARUH PENDAPATAN DAN BELANJA TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN  
PENGANGGURAN  
(Studi Pada APBN 2004-2008)**

**Dyah Arini Rudiningtyas**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang (UNISMA)**  
**Jl. MT. Haryono 193 Malang**  
**E-mail: [Nuning.arini@yahoo.com](mailto:Nuning.arini@yahoo.com)**

***Abstract:** APBN is the budget of country every period that describes government's capability and authority conducting the function of administration to reach the purpose of country. The purpose of this research is to examine the effect of revenue toward economy growth, the effect of expense toward economy growth, the effect of revenue toward poverty, the effect of expense toward poverty and the effect of revenue toward unemployment, the effect of expense toward unemployment. Sample of this research is APBN and realization of APBN from 2004 up to 2008. The same year also prevails for the level of economy growth, poverty, and unemployment. The period of this research is 2004-2008. The method applied in this study is the simple linier regression analysis by using SPSS program 15.0 version for windows. The result of this research shows that revenue does not have significant effect toward economy growth, expense does not have significant effect toward economy growth, revenue has significant effect toward poverty, expense has significant effect toward poverty, revenue does not have significant effect toward unemployment, and expense does not have significant effect toward unemployment.*

***Keyword:** revenue, expense, economic growth, poverty, unemployment*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan dasar pengelola keuangan negara dalam tahun anggaran tertentu yang berisi sumber pendapatan dan penggunaan dana pemerintah. Struktur anggaran pendapatan dan belanja negara disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBN yang membiayai belanja administrasi umum, belanja

operasi dan pemeliharaan, dan belanja pembangunan. Hal ini dijelaskan dalam peraturan pemerintah No.105 tahun 2000.

Pendapatan negara sebagai hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Permendagri No.13/2006 dan UU No.17/2003). Sedangkan belanja negara dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan negara yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam perundangundangan. Dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban negara yang diwajibkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Untuk mengoptimalkan pendapatan yang ada tidak hanya berpegang pada ekstensifikasi, tetapi juga intensifikasi serta pertumbuhan kegiatan ekonomi. Di dalam belanja pembangunan yang merupakan bagian dari belanja negara, dalam rangka membantu menekan defisit harus melakukan rasionalisasi dengan meninjau kembali proyek-proyek pembangunan yang prioritasnya rendah tanpa harus mengorbankan program-program sosial dasar utama yang dapat menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau program stimulus perekonomian. Skala prioritas dalam belanja pembangunan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, tetapi juga pada pendapatan dimasa yang akan datang. Optimalisasi pendapatan dan selektifitas serta prioritas belanja akan menumbuhkan perekonomian yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

Dritsakis dan Adamopoulos (2004) juga membuktikan bahwa belanja Negara berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa bila pertumbuhan ekonomi meningkat

maka daya serap angkatan kerja juga meningkat sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan kemungkinan besar dapat mengatasi tingkat kemiskinan. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran menjadi semakin serius. Walaupun hal tersebut merupakan dimensi-dimensi yang paling jelas untuk efektifnya seseorang bekerja. Faktor-faktor seperti motivasi, sikap dan hambatan-hambatan budaya juga harus diperhatikan.

Pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan perbaikan yang mantap selama beberapa tahun ini tidak berarti bahwa pekerjaan telah selesai. Perekonomian belum sepenuhnya pulih, kegiatan di sejumlah sektor khususnya di sektor riil masih di bawah kapasitas. Pertumbuhan ekonomi juga belum cukup untuk menyerap pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Ini dikarenakan perekonomian masih rentan terhadap kejutan (*shock*), baik karena faktor politik, sosial, kondisi negara lain serta berbagai hal lainnya Tujuan akhir pertumbuhan ekonomi adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran serta berbagai permasalahan lain yang melanda negeri ini.

Iskana (2009) meneliti tentang Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Untuk Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Menurut Bastian (2001) tujuan anggaran dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat ukur manajemen dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan politik, sehingga tujuan pengeluaran sebaiknya disetujui para legislator. Dalam hal ini, pihak unit kerja pemerintahan menjadi pelaksanaan pengolahan dana dan program. Menurut Mardiasmo (2002) fungsi utama anggaran sektor publik adalah sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat untuk menciptakan ruang publik. Sedangkan fungsi anggaran negara sendiri menurut Halim (2004) adalah: 1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk suatu periode di masa mendatang 2. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran Negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. 3. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih, karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR.

Menurut Arif, dkk (2002) prinsip-prinsip yang diperhatikan dalam penyusunan APBN, diantaranya sebagai berikut : a. Keterbukaan, dalam Negara demokrasi, rakyat perlu diikutsertakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan rancangan anggaran. b. Secara periodik yang berarti APBN disusun untuk setiap periode tertentu dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan periode APBN yang relevan. c. Pembebanan anggaran pengeluaran dimana prinsip ini membebaskan belanja secara *bruto*. d. Fleksibilitas, karena anggaran disusun berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang belum tertampung atau berubah. e. Prealabel, pengajuan dan pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus melalui pelaksanaan anggaran. f. Kecermatan, anggaran disusun dengan secermat mungkin sehingga meniadakan adanya kesalahan di dalam perhitungan. g. Kelengkapan dan universalitas dimana semua pos pendapatan dan belanja telah dimasukkan di

dalam APBN yang disusun pemerintah. h. Komprehensif, anggaran disusun dengan memperhitungkan semua kegiatan pendapatan dan belanja negara selama periode tertentu. i. Terinci, APBN disusun secara terinci sesuai dengan klasifikasi anggaran. j. Anggaran berimbang, pengeluaran anggaran harus didukung adanya penerimaan. k. Pendapatan yang tetap, (*continue*), APBN disusun dengan menekankan pada peningkatan pendapatan dalam negeri disbanding dengan belanja rutin. l. Kenaikan anggaran tiap tahun, APBN disusun dengan jumlah pendapatan dan belanja meningkat setiap tahun.

APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara) merupakan kekayaan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah. Pengurusan APBN termasuk dalam pengurusan umum/administratif meliputi hak penguasaan serta perintah menagih dan perintah membayar (Arif, dkk. 2002). APBN sebagai inti pengurusan umum merupakan anggaran negara yang terdiri atas rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja Negara untuk suatu periode tertentu.

Belanja pemerintah pusat/daerah dapat dikelompokkan menjadi: (1) Belanja Rutin/Operasional adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Belanja rutin / operasional terdiri dari: Belanja administrasi umum, Belanja pegawai, Belanja barang, Belanja perjalanan dinas, Belanja pemeliharaan. b. Belanja Investasi/Pembangunan adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja investasi terdiri dari : Belanja Publik, Belanja Aparatur. (2) Pengeluaran Transfer yaitu pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria : a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa, b. Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman. c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, dana bantuan dan dana cadangan.

2). Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan: a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, b. Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan atau tidak tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.

Menurut Bastian (2001) tujuan anggaran dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat ukur manajemen dan instrument kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan politik, sehingga tujuan pengeluaran sebaiknya disetujui para legislator. Dalam hal ini, pihak unit kerja pemerintahan menjadi pelaksanaan pengelolaan dana dan program. Menurut Mardiasmo (2002) fungsi utama anggaran sektor publik adalah sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat untuk menciptakan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Definisi dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. (Sukirno 2004). yang mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai besar yang diukur dari kenaikan besarnya pendapatan nasional pada periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Pendapatan nasional sebagai nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara tersebut dihitung secara riil atau menurut harga tetap pada harga-harga di tahun tertentu yang berbeda dengan tahun dimana produksi nasionalnya dihitung. Pertumbuhan perekonomian diartikan sebagai kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Alat pengukuran pertumbuhan perekonomian dapat dilihat pada kenaikan produk domestik regional bruto. Perhitungan produk domestik regional bruto berbagai macam caranya, menurut BPS dalam Wulandari (2009), menyebutkan bahwa

pengertian produk domestik regional bruto dapat dilihat dari tiga sisi yaitu produksi, pendapatan dan pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi diketahui dari kenaikan produk domestik regional bruto. Setiap negara mempunyai kesempatan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi oleh karena faktor-faktor produksi bertambah dari satu periode ke periode lainnya, sehingga pendapatan nasional dapat ditingkatkan. Beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi (Sukirno 2004) diantaranya sebagai berikut: 1. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya. 2. Jumlah dan Kualitas dari Penduduk dan Tenaga Kerja. 3. Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi.

Kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Semua tingkat kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu: 1) pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. 2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu a. kemiskinan mutlak adalah jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. b. kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan atau erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro, 1997). Kemiskinan dapat muncul sebagai akibat dari tingginya tingkat pengangguran suatu negara atau daerah tertentu. Akan tetapi kemiskinan tidak hanya diakibatkan oleh ketiadaan pekerjaan. Kondisi tersebut bisa juga terjadi karena kemalasan, ketidakmauan untuk bekerja keras yang hanya menunggu adanya pemberian dari orang lain. Selain itu persoalan kemiskinan juga terletak pada adanya ketidakpastian dari pemerintah yang memberikan janji-janji palsu untuk masyarakat awam. Sharp, et.al dalam kuncoro (1997) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya



ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang ditimpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Menurut Arsyad (1999:), indikator kemiskinan untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita pertahun bisa digolongkan miskin dan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita pertahun. Tingkat pendapatan penduduk di daerah perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan sehingga mempengaruhi pula pola pengeluaran. Masalah pengangguran yang terjadi akibat tidak adanya perkembangan sektor riil dalam menciptakan lapangan pekerjaan ini memicu rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja (jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu) ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno 2004). Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara efektif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran.

Timbulnya masalah pengangguran yang cukup serius tersebut akan memicu kendala dalam perkembangan kondisi perekonomian. Keadaan perekonomian yang berjalan lambat ini disebabkan oleh rendahnya pengeluaran *agregat* sebagai faktor utama yang menimbulkan pengangguran. Pengeluaran *agregat* merupakan perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian pada waktu tertentu pada berbagai tingkat pendapatan negara. Menurut Sukirno (2004) faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah:

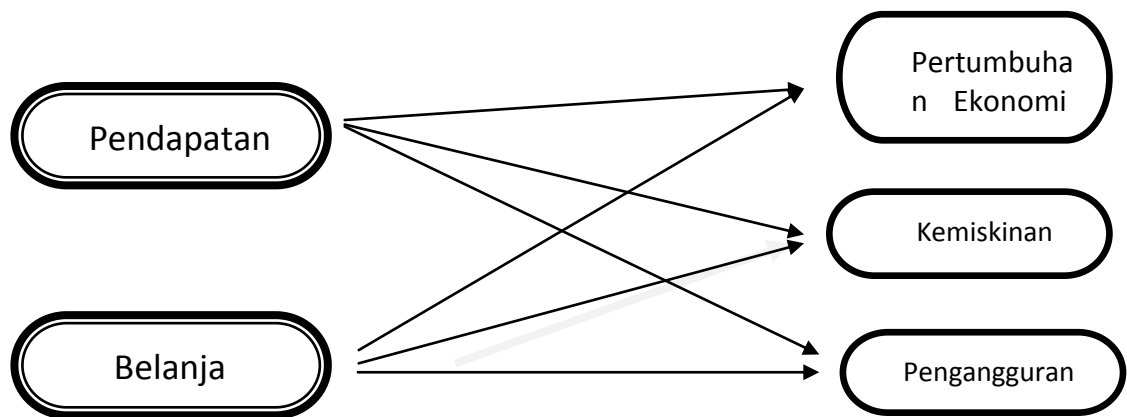
- Menganggur karena ingin mencari kerja yang lain.
- Penggunaan peralatan produksi modern, mengurangi penggunaan tenaga kerja.
- Ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang



dibutuhkan dalam proses produksi. Menurut Sukirno (2004) membedakan jenis pengangguran : a. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, (pengangguran normal, pengangguran Siklikal, pengangguran Struktural, pengangguran teknologi). b. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya (pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, setengah menganggur).

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi pada RAPBN dengan kerangka konseptual sebagai berikut :



Penelitian ini menggunakan data kuantitatif pada RAPBN tahun 2004 - tahun 2008 yang ada pada kantor BPS Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melihat, mencatat, menganalisa dan mengevaluasi data sekunder yang diperoleh dari kantor BPS Jawa Timur.

Dalam penelitian ini digunakan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, variabel kemiskinan dan variabel pengangguran, sedangkan variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel pendapatan dan variabel belanja.

## Definisi Operasional

Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum atau oleh rutintitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan penerimaan tersebut menjadi hak

pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara itu, pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (PP No. 24/2005). Hal ini dapat dirumuskan (Sukirno,2004) sebagai berikut :

$$\text{PN} = \text{PNB} - \text{Pajak tak langsung} - \text{Depresiasi}$$

Belanja Pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun daerah. Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Hal ini dapat dirumuskan (Halim, 2004) sebagai berikut:

$$\text{Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBN}} \times 100 \%$$

Pertumbuhan ekonomi/perubahan pendapatan nasional (produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Variabel ini diuji menggunakan data tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara dalam suatu periode tertentu. Dalam hal ini untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada kenaikan Produk Domestik Bruto. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan data realisasi PDRB tahun 2004 - 2008 yang diukur dalam jutaan rupiah. Menurut Kuncoro (2004) dalam Wulandari (2007) rumus yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam satuan persentase (%) adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana sekelompok orang memiliki pendapatan yang tidak cukup dan kemampuan yang terbatas dalam mempertahankan hidup. Variabel terikat ini diukur berdasarkan tingkat kemiskinan negara dari beberapa desa dan kota pada tahun tertentu. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran atau besarnya rupiah yang dibelanjakan. Dan untuk menghitung kemiskinan, BPS menggunakan garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) yang merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita perhari dan garis kemiskinan non makanan (GKNM) yang merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat dirumuskan :  $GK = GKM + GKNM$

Indikator lain yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* - P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Distributionally Sensitive Index* - P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke (FGT, 1984) sebagai berikut :

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno 2004). Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Data tingkat pengangguran diperoleh dari perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah pengangguran negara pada tahun tertentu. Adapun rumus (Halim, 2004) yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengangguran suatu negara yang dinyatakan dalam satuan persentase adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mengetahui jumlah penduduk yang menganggur dinyatakan dalam satuan jiwa adalah persentase tingkat pengangguran dari jumlah penduduk suatu negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang dikumpulkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran yang terdaftar di BPS Jawa Timur dari tahun 2004 - tahun 2008 untuk dianalisis kemudian diambil suatu kesimpulan. Untuk mengetahui faktor penentu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran maka peneliti menggunakan beberapa variabel diantaranya pendapatan dan belanja.

### Uji Normabilitas

Tujuan dari uji asumsi normabilitas adalah untuk mengetahui apakah dari validitas dan reabilitas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model normabilitas yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Menurut H. W Lilliefors memperkenalkan sejenis uji *Kolmogorof Smirnov* untuk menguji kenormalan data tanpa perlu menetapkan nilai rata-rata dalam ragam distribusi normal. Adapun pedoman dalam pengambilan keputusan bahwa suatu data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansi pada kolom uji *Kolmogorof Smirnov* lebih dari 0,05

Tabel 1

### Uji Normabilitas

No	Variabel	Kolmogor of Smirnov	Asymp p Sig	Nilai Kritis	Keterangan
1.	Pendapatan	0,950	0,220	> 0,05	Berdistribusi Normal
2.	Belanja	0,979	0,183	> 0,05	Berdistribusi Normal
3.	Pertumbuhan Ekonomi	0,657	0,309	> 0,05	Berdistribusi Normal
4.	Kemiskinan	0,976	0,137	> 0,05	Berdistribusi Normal
5.	Pengangguran	0,988	0,145	> 0,05	Berdistribusi Normal

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki Asymp Sig > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel data yang berdistribusi normal.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan durbin waston t test dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Uji Autokorelasi**

Model	DW Statistik	dL	dU	Range Du < DW < 4-dU	Ket.: Bebas
Tanpa Interaksi	1,993	0,520	1,444	1,444 < 1,993 < 2,556	Autokorelasi

Tabel 2 menunjukkan bahwa DW statistik terletak dalam Range Du < DW < 4-dU hal ini berarti bahwa masing-masing model bebas masalah autokoelasi.

## 2. Uji Heterokedastisitas

Pengujian Heterokedastisitas dilakukan menggunakan metode Glester-Test. Prosedur ini dilakukan dengan terlebih dahulu mencari nilai residual kemudian dilakukan regresi ini residual tersebut sebagai variabel dependent terhadap variabel bebas.

Adapun dari hasil uji Heterokedastisitas ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.**  
**Gletser-test**  
**Coefficients**

Model	Unstandar dized Coefficient		Standardi zed Coefficie nt	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Erro r	Beta			Toleran ce	VIF
1. Constant)	-	.821		-1.982	.052		
Pendapatan	1.62	.188	.122	1.015	.314	.995	1.149
Belanja	.191	.529	.145	1.199	.235	.867	1.153
	.535						

Pada table 3 menunjukkan bahwa seluruh variable bebas yang terdiri dari Pendapatan dan Belanja memiliki t hitung dengan tingkat signifikansi masing-masing berada diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa bariabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual yang berarti pula model memenuhi heteroskedasitisitas.

## 3. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
----------	-----------	-----	------------

Pendapatan	0.995	1.149	Bebas Multikolinieritas
Belanja	0.867	1.153	Bebas Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 4, variabel Pendapatan memiliki VIF 1.149, variabel Belanja memiliki VIF 1.153, memnginat seluruh variabel bebas memiliki VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel memiliki asumsi multikolinieritas.

### Pembahasan

Berdasarkan dibawah hasil regresi linier berganda sebagaimana pada tabel

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Linier Berganda**

No.	Variabel	b	t-stat	Sig
1.	Pendapatan	.191	1.015	.314
2.	Belanja	.535	1.199	.235
Constanta		= -1.628	F uji	= 3.769
R		= 0.378	Sig	= 0.015
R Square		= 0,143		

Berdasarkan hasil analisis didapatkan *R Square* sebesar 0.143, hal ini berarti bahwa 14,3 % perubahan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan penangguran dipengaruhi Pendapatan dan Belanja , sedangkan sisanya 85,7 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidaak dimasukkan dalam model.

Berdasarkan hasil analiis F uji 3,769 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.015. Oleh karena tingkat signifikansi F pada model ini < 0,05, maka hal ini berarti secara serentak Pendapatan dan Belanja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran.



**Tabel 6**  
**Hasil uji t**

No	Variabel	t-stat	Sig
1.	Pendapatan	1.015	.314
2.	Belanja	1.199	.235

Variabel Pendapatan memiliki t uji sebesar 1.015 dengan tingkat signifikan sebesar 0.314. Oleh karena tingkat signifikan  $> 0.05$ , maka H1 regresinya yang bersifat positif, maka hal ini ditolak. Atau dengan kata lain secara parsial variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Bila dilihat dari koefisien regresinya yang bernilai positif, hal ini berarti bahwa semakin tinggi pendapatan maka pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran akan semakin tinggi pula. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil Hamzah (2007) yang menemukan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran.

Variabel Belanja memiliki t uji sebesar 1.199 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.235. Oleh karena tingkat signifikansi  $> 0.05$ , maka H2 ditolak. Dengan kata lain secara parsial variabel Belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Bila dilihat dari koefisien regresinya yang bernilai positif, hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat Belanja maka pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran akan semakin tinggi pula. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Hamzah (2007) yang menemukan bahwa Belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pendapatan dan belanja tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi selama tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008. Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2007) dan Iskana (2009). Hal ini dapat disebabkan adanya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir (tahun 2004 - tahun 2008). Kedua, Pendapatan dan belanja tidak berpengaruh terhadap kemiskinan selama tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008.

Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskana (2009). Hal ini dikarenakan salah satu sumber pendapatan nasional berasal dari rakyat dalam bentuk pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa artinya pajak wajib dibayar tanpa memperdulikan apakah rakyat punya uang atau tidak, sehingga semakin besar pendapatan daerah berarti semakin banyak pula hasil pajak yang terkumpul dari rakyat. *Ketiga*, pendapatan dan belanja tidak berpengaruh terhadap pengangguran selama tahun anggaran 2004 sampai dengan 2008. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2007) dan Iskana (2009). Hal ini dapat disebabkan jumlah pencari kerja yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang tinggi pula.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan hasil penelitian, maka berikut ini diberikan beberapa saran, yaitu; *Pertama*, penelitian selanjutnya hendaknya menambah atau mengganti, baik variabel-variabel independen maupun dependen yang dimungkinkan relevan dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. *Kedua*, penelitian berikutnya tidak hanya tertuju pada APBN tetapi juga pada APBD Kota, Kabupaten dan Propinsi. Dan *ketiga*, menyarankan hendaknya penelitian ke depan menambah periode pengamatan agar dapat diketahui lebih jauh pengaruh pendapatan dan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bachtiar, Muchlis dan Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF
- \_\_\_\_\_. 2002. *Sistem Akunansi Sektor publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2007. *Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS* Jakarta: BPS
- Dritsakis, Nikolas dan Adamopoulus, Antonis. 2004. A Causal Relationship Between Government Spending and Economic Development: An Empirical Examination of the Greek Economy. *Journal Applied Economics*.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Gozhali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi II. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gozhali, Imam dan John Castellan. 2002. *Statistik non-parametrik-Teori dan Aplikasi Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi. 2007. *Pengaruh Belanja Dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran (Studi Pada APBN 1999-2006)*. Konferensi Penelitian. Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Jatim; Pasca Sarjana PNU.
- Hasan, Iqbal. 1999. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensi)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo 1999. *Metode Penelitian bisnis Untuk Akuntansi Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Iskana, Ida. 2009. *Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran*. SKRIPSI, tidak dipublikasikan, Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- \_\_\_\_\_.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Singarimbun dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Suharyadi dan Purwanto. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi*. Cetakan ke 5, Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Waluyo, Dwi Eko. 2006. *Ekonomika Makro*, Edisi Revisi. Malang: UNMUH.
- Wulandari, Nita. 2008. *Hubungan Antara Belanja Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah*. SKRIPSI, tidak dipublikasikan. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam.